

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

ANGGA AULIA RAHMANDA

145020107111018



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA**

Yang disusun oleh :

Nama : Angga Aulia Rahmanda
NIM : 145020107111018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 9 Mei 2018.

Malang, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Al Muizzudin Fazaalloh, SE., ME

NIP 198604032015041002

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

Angga Aulia Rahmanda, Al Muizzudin Fazaalloh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: Anggaauliarahmanda11@gmail.com

ABSTRAK

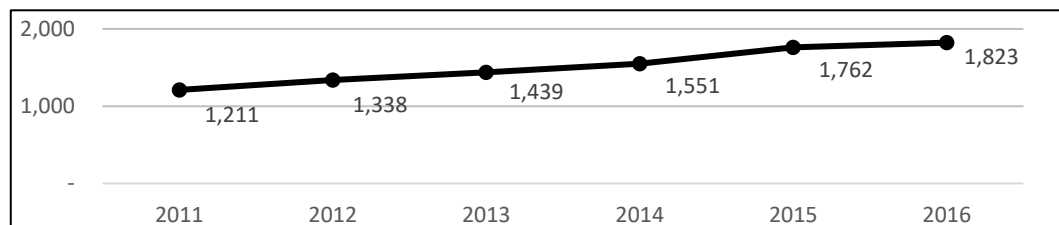
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menghasilkan model yang terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan untuk desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator pengeluaran dan indikator otonomi memiliki hasil yang sama yakni tidak memiliki pengaruh signifikan ke pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan merupakan sebuah awal dimulainya era desentralisasi di Indonesia yaitu adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan tersebut semata-mata dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah dan menghilangkan kesenjangan daerah dengan diberikannya transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Gambar 1: Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2011-2016 (dalam Triliun Rupiah)



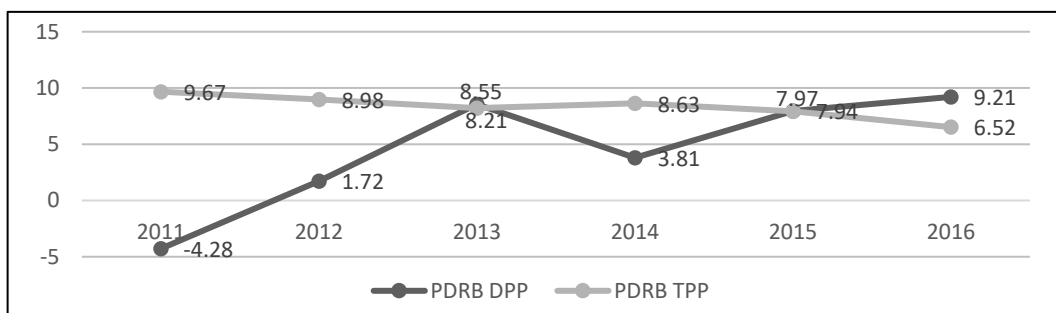
Sumber: Data diolah Kemenkeu, 2018

Gambar 1 menjelaskan bahwa pendapatan negara dalam APBN dari tahun 2011-2016 memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang di daerahkan untuk setiap pemerintah daerah akan meningkat juga. Peningkatan jumlah dana yang didaerahkan tampak begitu signifikan terutama pada daerah dengan sumber daya alam yang melimpah namun selama ini masih tergolong daerah yang tertinggal yaitu Provinsi Papua. Dana perimbangan yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota Provinsi Papua setiap tahun mengalami

peningkatan baik dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus sampai dengan dana bagi hasil. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah apakah semakin meningkatnya dana tersebut akan seiring juga dengan pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator utama percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat?

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan jawaban dari kekhawatiran diatas. Pada transfer dana ke daerah terdapat kekhususan untuk Provinsi Papua dalam perolehan besarnya yang berdasarkan mandate Undang-Undang diatas. Kekhususan tersebut ialah diberikannya dana otonomi khusus yang hanya diberikan oleh Provinsi Papua diantaranya dana penerimaan khusus dan dana tambahan infrastruktur. Hal ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Papua yang dirasa masih tertinggal dari segi perekonomian dari daerah-daerah lainnya. Tuntutan atas kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah di Papua yang disertai dengan dana otonomi khusus diharapkan akan dapat solusi terbaik. Sayangnya besarnya dana yang dialokasikan belum dapat mendorong perekonomian di Papua tumbuh dengan cepat sebagaimana cepatnya pertumbuhan alokasi dana yang didaerahkan.

Gambar 2: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Dengan dan Tanpa Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011-2016 (dalam persen)



Sumber: Data diolah BPS Provinsi Papua, 2018

Gambar 2 menjelaskan bahwa untuk menggambarkan perekonomian di Papua yang lebih ri, sektor pertambangan dan penggalian dieliminir, karena sebagian besar nilai tambah dari sektor tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Papua. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan pula pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan dan penggalian karena lebih mencerminkan perekonomian Papua yang sesungguhnya dan ternyata mengalami penurunan tiap tahunnya. Selain itu jika dilihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota memiliki angka yang besar dan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi dengan angka yang terbilang tinggi di Papua, faktanya masih jauh dari kata sejahtera bagi masyarakatnya.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak dilakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi dengan segelintir penelitian masih minim sekali penelitian di Indonesia dengan menggunakan pengukuran untuk menjelaskan desentralisasi fiskal berdasarkan penelitian internasional dan berfokus pada wilayah Kabupaten/Kotateruntuk di Provinsi Papua yang memang memiliki keistimewaan tersendiri dalam perolehan dana transfer. Hal itulah yang menjadi gap riset dalam penelitian ini sedangkan gap teorinya ialah dengan dana yang berlimpah yang telah disalurkan ke Papua serasa belum terpenuhi harapan dari Pemerintah pusat dengan serasinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini menjadi alasan kuat untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekoomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan perkembangan suatu perekonomian pada tahun ini dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya. Perkembangan suatu perekonomian selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional, atau sering juga disebut Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Berikut adalah teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi yang akan memperjelas teori dalam penelitian diantaranya teori pertumbuhan klasik, Neoklasik, Baru, dan Rostow. Teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, teknologi, pembentukan atau akumulasi modal.

Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan dengan pelayanan publik, mengingat fungsinya sebagai suatu alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Desentralisasi fiskal lebih menjurus kepada pemberian bantuan keuangan dari pemerintah pusat, berbeda dengan desentralisasi yang hanya sebatas memberikan kewenangan.

Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah merupakan bagian belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian (PMK Nomor 06/PMK.07/2012). Provinsi Papua mendapatkan semua transfer ke daerah baik dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang hanya di dapatkan daerah tertentu. Salah satu tujuan diberikannya dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah masing-masing serta sektor unggulan setiap daerah yang berbeda-beda. Sedangkan dana otonomi khusus hanya diberikan kepada Provinsi Papua dikarenakan adanya pertimbangan tertentu salah satunya ialah keterlambatan pembangunan di wilayah tersebut yang mengakibatkan adanya ketimpangan antar daerah di Indonesia.

Teori *Fiscal Federalism*

Teori *Fiscal Federalism* merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959), dan Oates (1972) dalam Tsalits (2017). Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Teori ini memperjelas bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal yakni adanya pelimpahan kewenangan fiskal oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri. Dengan diberikannya kewenangan di setiap daerah maka setiap pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui potensi bahkan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi daerahnya. Lama-kelamaan dapat mencapai kualitas serta efisiensi pelayanan publik. Dan pada akhirnya akan tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah otonom.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-2016. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang menggunakan alat bantu perangkat lunak statistik yaitu Eviews versi 10. Variabel dependen menggunakan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan PDRB per kapita, sedangkan variabel independen menggunakan variabel desentralisasi fiskal dan variabel kontrol. Variabel desentralisasi fiskal merujuk pada penelitian (Akai dan Sakata, 2002) dengan diukur melalui indikator penerimaan (Rasio pendapatan daerah kabupaten/kota terhadap pendapatan daerah Provinsi), indikator pengeluaran (Rasio belanja daerah kabupaten/kota terhadap belanja daerah Provinsi), dan indikator otonomi (Rasio pendapatan asli daerah kabupaten/kota terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota). Sedangkan variabel kontrol terdapat pertumbuhan penduduk dan investasi daerah yang diukur melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap PDRB. sumber data diperoleh dari BPS masing-masing kabupaten/kota dan Provinsi Papua, Kemenkeu, DJPK, dan BPKAD Provinsi Papua. Berikut adalah model regresi dalam penelitian ini:

$$GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(RI, PI, AI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

GDP_{it}	: tingkat pertumbuhan PDRB per kapita (%)
DEC_{it}	: Desentralisasi fiskal (%)
RI	: Indikator penerimaan (%)
PI	: Indikator pengeluaran (%)
AI	: Indikator otonomi (%)
X_{it}	: Variabel kontrol (%)
POP	: Pertumbuhan penduduk (%)
INV	: Investasi daerah (%)
β	: Koefisien regresi
i	: daerah
t	: waktu
ε_{it}	: Error

D. PEMBAHASAN

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak lepas dari pengaturan pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah sebagai otoritas yang berkuasa penuh atas pengelolaan APBD diharapkan dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini mencoba untuk membahas sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal melalui pengukuran indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Indikator Penerimaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada hasil estimasi penelitian ini. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai koefisien dari hasil estimasi bernilai negatif untuk indikator penerimaan. Rasio dari indikator penerimaan mencerminkan wewenang dari setiap pemerintah daerah dalam penerimaan. Sehingga jika nilai rasio indikator penerimaan tinggi maka setiap daerah memiliki wewenang yang tinggi untuk mengelola dana yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ke setiap kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai rasio dari indikator penerimaan tinggi maka berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuskhov (2015) dan situngkir et al (2014) bahwa

desentralisasi fiskal dari indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki insentif untuk membelanjakan anggaran secara lebih efisien.

Semakin besar dana transfer yang didapat maka semakin besar pula kewenangan di suatu daerah. Dana perimbangan yang selalu meningkat setiap tahunnya serta porsi yang begitu besar dan dana otonomi khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain memberikan bukti bahkan indikasi bahwa kewenangan di setiap kabupaten/kota di Papua sangat tinggi dalam mengelola dana transfer tersebut. Namun dengan kewenangan yang besar malah berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua diketahui penggunaan dana otonomi khusus di Papua belum optimal serta dalam penggunaan dana tersebut kurang disertai dengan perencanaan yang matang. Beberapa proyek yang didanai dana otonomi khusus tidak terukur sehingga terkesan mubazir serta manfaatnya belum terasa secara langsung dan benar. Diperkuat lagi dari penelitian Hutajulu (2014) dan Hutajulu et al (2012) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Papua pada masa otonomi khusus kurang efektif dengan ditandainya pengelolaan pendapatan daerah disusun kurang perencanaan dan terjadinya *idle-fund*.

Dengan banyaknya daerah yang kurang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah muncul pengindikasikan lain penyebab masalah tersebut. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di setiap daerah yang kurang mampu mengelola dengan benar penerimaan daerah. Hal ini mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah Provinsi Papua. Keberhasilan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan data rata-rata angka partisipasi sekolah di kabupaten/kota provinsi Papua masih banyak daerah yang mempunyai angka rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Papua. Oleh karena itu, dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah memicu adanya ketidakefektifan pengelolaan keuangan daerah di Papua.

Pengaruh Indikator Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada hasil estimasi memberikan hasil bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil tersebut dengan jelas terlihat tidak sesuai dengan landasan teori bahkan hipotesis pada penelitian. Sama halnya dengan indikator penerimaan, indikator pengeluaran mencerminkan wewenang daerah dalam membelanjakan dana yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ke setiap kabupaten dan kota. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator pengeluaran tidak mempengaruhi sama sekali baik naik bahkan turunnya kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian Rustan (2013). Indikasi yang muncul ialah dikarenakan porsi belanja pegawai lebih besar daripada porsi belanja modal. Berbagai sumber menyatakan bahwa belanja modal disebut sebagai belanja pembangunan karena merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran serta manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Indikasi lainnya menurut perbandingan rata-rata belanja per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Papua menyatakan bahwa sebagian daerah masih belum tepat sasaran dalam membelanjakan dana sesuai kebutuhan. Serta indikasi terakhir yakni menurut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 adanya korupsi APBD di berbagai daerah di Papua diantaranya kabupaten Waropen, kabupaten Mimika, kabupaten Biak Numfor, dan kota Jayapura. Permasalahannya adalah terjadinya penganggaran ganda terhadap suatu proyek atau kegiatan, selain itu nilai proyek juga dgelembungkan atau di *mark-up*, serta penggunaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menyalahgunakan kewenangan dengan cara memindahbukukan kas daerah ke rekening pribadi sejak tahun 2011-2013. Dan baru-baru ini tahun 2017 adanya dugaan korupsi APBD tahun anggaran 2013-2016 oleh kepala daerah Provinsi Papua dengan permasalahan penyaluran dana beasiswa hingga dana pelaksanaan proyek-proyek. Menurut Prud'home (1995) mengatakan bahwa beberapa persoalan yang menjadi penyebab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya ialah meningkatnya korupsi di tingkat lokal karena umumnya politisi dan birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan.

Pengaruh Indikator Otonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembahasan terakhir akan dijelaskan mengenai desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator otonomi. Indikator otonomi mencerminkan kemandirian fiskal karena kemandirian fiskal merupakan pengukuran yang digunakan untuk melihat seberapa mandiri suatu daerah untuk dapat mengelola keuangannya sendiri dengan melihat potensi yang dimiliki dari daerah tersebut. Di provinsi papua tidak diragukan lagi memiliki kekayaan alam yang melimpah, selayaknya hal itu menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah papua cenderung tinggi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.

Dalam penelitian ini justru memberikan hasil yang berbeda dari yang diharapkan dengan indikator otonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi PAD terlihat sangat kecil di semua daerah papua jika dibandingkan dengan dana transfer ke total pendapatan daerah. Tidak lebih dari 5% kontribusi yang disumbangkan oleh semua daerah di papua kecuali dua daerah yakni kabupaten mimika dan kota jayapura yang masing-masing memiliki kontribusi sedikit lebih tinggi sebesar 13,6% dan 11,4% terhadap total pendapatan daerah tersebut. Bahkan faktanya sebagian daerah masih ada yang tidak menghasilkan pajak bahkan retribusi daerah.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan penduduk dan investasi daerah. Berdasarkan hasil analisis bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil tersebut sudah sesuai dengan penelitian terdahulu serta teori-teori yang ada. Sedangkan untuk investasi daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang mana juga sudah sesuai dengan penelitian terdahulu yang ada.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi bahwa secara simultan desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi serta variabel kontrol yakni pertumbuhan penduduk dan investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan secara parsial, indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif serta indikator pengeluaran dan indikator otonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan dan negatif serta investasi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengevaluasi dan meningkatkan lagi dalam pengelolaan keuangan, terutama pada sumber daya manusia serta sarana dan prasarana teknologinya.
2. Pemerintah daerah perlu memperbesar porsi belanja modal dibandingkan belanja pegawai. dengan perkembangan alokasi belanja modal yang semakin baik pada belanja daerah maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Selain itu, selayaknya penggunaan dana dalam belanja daerah haruslah tepat sasaran dan jangan sampai di salahgunakan.
3. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari transfer pusat. Cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan dengan baik dan memfokuskan sektor-sektor perekonomian di Papua yang berpotensi memiliki efek pengganda sehingga pendapatan asli daerah (PAD) memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk

penguatan *local taxing power* melalui revisi UU pajak dan retribusi daerah harus mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal.

4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba daerah-daerah lain di Indonesia dan menambah variabel lain untuk variabel kontrol agar menghasilkan estimasi yang jauh lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT serta berbagai pihak yang telah membantu baik orang tua, saudara-saudara bahkan teman-teman sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo dan Sakata, Masayo. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal of Urban Economics* 52.
- BPS Provinsi Papua. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua, Profil Ketenagakerjaan, Indikator Pendidikan, Laporan Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua*. (<https://papua.bps.go.id>). Diakses pada Januari 2018
- Hutajulu et all. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 5, No. 2*
- Hutajulu, Halomoan. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 1*.
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. (www.kemenkeu.go.id). diakses pada Desember 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah*.
- Prud'homme, R. 1995. The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer, Vol. 10, No. 2*.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Situngkir et all. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom, Vol. 17, No. 3*.
- Tsalits, Irham M. 2017. *Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Yushkov, Andrey. 2015. Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and The Russian Experience. *Russian Journal of Economics, Volume 1, Issue 4, 404-418*.